

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasar

Pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Pasar mempunyai lima fungsi utama. Kelima fungsi tersebut menurut Sudarman (1989) adalah:

- a. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai.
- b. Pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen (*entrepreneur*) memilih metode produksi yang efisien.
- c. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada penghasilannya.
- d. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Penjatahan adalah inti dari adanya harga.
- e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang.

Istilah pasar banyak mendapatkan perhatian selama bertahun – tahun. Pada dasarnya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Selain itu, pasar dapat pula diartikan sebagai himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Dalam hal

demikian pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama. Dimana setiap konsumen bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Rismayani, 1999).

Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian badan jalan. Selanjutnya pengelompokkan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal mana organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang kotor dan pola bangunan yang sempit. Dalam penelitian ini juga dipaparkan beberapa potensi dan ciri pasar tradisional, yaitu:

- a. Kemampuan pasar tradisional dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya.
- b. Berfungsi sebagai *supplier* untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas.
- c. Pasar tradisional memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern.
- d. Para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita, dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen.

Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut di antaranya harganya yang lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan permukiman, dan memberikan banyak pilihan produk yang segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar tradisional lebih dikenal kelemahannya.

Kelemahan itu antara lain adalah kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bawahan terlalu padat lalu lintas pembelinya. Ditambah lagi ancaman bahwa keadaan sosial masyarakat yang berubah, di mana wanita di perkotaan umumnya berkarir sehingga hampir tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke pasar tradisional (Esther dan Didik, 2003), selain kelemahan-kelemahan tersebut, faktor desain dan tampilan pasar, atmosfer, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi pengeluaran, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern (Ekapribadi. W, 2007).

B. Pedagang

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau satuan (Sugiharsono,2000). Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting

dengan maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masi berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang yang telah dilakukan oleh (Damsar 1997) dapat disimpulkan bahwa pedagang dibagi atas :

1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
2. Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga. Derajat tambahan tersebut berbeda pada setiap orang dan masyarakat.
3. Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas substensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.
4. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu

luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh uang, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Metode pelayanan yang digunakan di pasar tradisional adalah tawar menawar dimana harga terbentuk melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagian besar tempat berjualan yang ditempati oleh pedagang di Pasar Tempel Way Halim berbentuk kios dan lapak serta emperan yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Di dalam Pasar Tempel Way Halim terdapat ke tiga jenis pedagang seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu meliputi pedagang profesional, semi profesional, serta subsistensi

C. Rentenir

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya untuk memperoleh keuntungan melalui tingkat bunga. Praktek rentenir merupakan salah satu aktivitas ekonomi dalam pinjam meminjam uang yang pada umumnya banyak diminati oleh orang-orang dari strata pendapatan rendah (menengah kebawah) yang membutuhkan kredit-kredit untuk membayar biaya hidup sehari-hari maupun untuk berusaha (Nugroho, 2001).

Menurut Sukmadi (1994) rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tunai kepada para nasabahnya dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang secara tunai kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga.

Dalam literatur ekonomi dan sosiologi pembangunan, bunga yang tinggi dalam pasar kredit informal di pedesaan di negara-negara berkembang sering diinterpretasikan sebagai ekspresi keterbelakangan. Aktivitas rentenir yang memiliki etos “memperoleh uang sebanyak mungkin”, dicurigai sebagai penyebab terjerumusnya pedagang dan pengusaha kecil dalam “perangkap hutang” yang akan membawa pada perbudakan bunga. Situasi ini dianggap tercipta oleh perilaku rentenir, yang dilakukan dengan cara memelihara ketergantungan nasabah terhadapnya, sehingga mereka dapat membawa nasabah pada perangkap hutang. Cara untuk menjamin ketergantungan ini adalah melalui strategi “*Interest Forever, Capital Never*”, berarti bunga diwajibkan dibayar dalam setiap ciclan, baki kredit dibayar belakangan. Jadi, hubungan diantara keduanya bersifat eksploitatif. (Nugroho, 2001).

Rentenir pada satu sisi sering dianggap sebagai lintah darat karena menarik bunga yang tinggi. Sedang pada sisi lain, ia memiliki fungsi-fungsi ekonomi yaitu sumber tambahan modal ataupun sumber keuangan untuk kebutuhan konsumsi. Sudut pandang rentenir terlihat negatif karena karena kegiatan rentenir ini merugikan banyak pihak. Biasanya pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat yang kurang mampu. Hal ini tentu saja mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan kesejahteraan karena keuntungan yang seharusnya diperoleh terus digunakan untuk membayar angsuran serta bunganya.

Rentenir merupakan suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang

jasa pelayanan simpan pinjam uang. Sebagai contoh lembaga tersebut seperti Penggadaian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum. Perbedaannya terletak di statusnya bukan sebagai lembaga legal.

Ada dua argumen utama yang mendasari terjadinya realitas mengapa kredit yang ditawarkan oleh rentenir lebih populer dari pada agen-agen pemerintah. Pertama, lembaga-lembaga finansial informal lebih atraktif dalam berpraktek mencari nasabah dari pada lembaga-lembaga formal. Rentenir lebih fleksibel dalam menjalankan prakteknya bahkan mengembangkan hubungan personal dengan para nasabah, sementara bank-bank resmi lebih bersifat “rasional” di mata para nasabah di pedesaan. Fleksibilitas merupakan hal penting dalam menjaga hubungan rentenir-nasabah, misalnya ada upaya rentenir untuk memahami kondisi ekonomi nasabah sehingga tidak jarang sering memberi kesempatan menunda pembayaran kredit. Kedua, rentenir dapat mengatasi “problem kepercayaan” yang dihadapi warga masyarakat yang tidak familiar dengan prosedur sistem legal. Atas dasar itu transaksi kredit dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kepercayaan. Sistem kepercayaan seperti ini merupakan bagian dari budaya transaksi uang dalam masyarakat pedesaan. (Heru Nugroho,2001).

Biasanya rentenir bekerja dengan cara menawarkan-menawarkan modal kepada pedagang-pedagang kecil seperti di pasar (pedagang sayur, ikan, daging dan lainnya), kaki lima, asongan maupun usaha-usaha kecil lainnya. Sehingga dari kegiatan rentenir tersebut secara cepat ataupun lambat apabila masyarakat memiliki masalah mendadak dengan keuangan mereka seperti berobat ke rumah sakit, biaya

pulang kampung dan kebutuhan tambahan modal untuk usaha mereka. Hukum meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan tanpa memiliki ijin resmi sangat dilarang oleh pemerintah maupun agama, karena pinjaman dengan bunga tinggi bukannya menolong orang yang sedang memerlukan uang, tapi malah cenderung memeras dan membuat si peminjam semakin terlilit hutang dengan bunganya.

D. Tukang Kredit

Aktivitas sebagai Tukang Kredit ini adalah menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan nominal yang kecil. Aneka barang kebutuhan kecil dapat dicicil, baju, celana, sepatu, perabot. Keunggulan kredit ini adalah fleksibilitas dalam pembayaran untuk jangka waktu yang panjang. Seribu dua ribu yang tidak terasa dari hari kehari. Keunggulan lain adalah biaya tenaga kerja yang kecil. Usaha ini dioperasikan oleh seorang diri. Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Transaksi layaknya tukang kredit keliling ini pun tak ubahnya seperti membudayakan masyarakat untuk terbiasa berhutang. Dilain sisi, memang masarakat kecil merasa terbantu dengan adanya keberadaan mereka yang berani memberikan kreditan barang. Tapi dilain sisi para tukang kredit keliling ini sekaligus memupuk tradisi konsumtive, meski dengan cara berhutang.

E. Tengkulak

Hegemoni adalah tentang kelas yang berkuasa mampu mensubordinasi kelompok sosial supaya menyetujui hubungan yang ada, dan ia akan melakukannya dengan menawarkan harga kepada kelompok, dengan begitu apa yang disetujui sebenarnya adalah hasil negosiasi dari ideologi dan budaya kelas yang berkuasa. Begitu pula hubungan yang terjadi antara petani dengan tengkulak berawal dari hubungan dagang antara penjual dengan pembeli. Kemudian hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan yang lebih intens dan mengarah kepada hubungan yang saling terkait satu sama lain dan sulit dipisahkan karena didasari oleh hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Hubungan itu tercermin/terlihat dari tindakan yang mereka lakukan baik petani maupun tengkulak dalam melakukan hubungan tersebut.

Tindakan tersebut terdiri dari tindakan rasional dan tindakan non-rasional. Tindakan rasional yang dilakukan petani adalah karena berdagang merupakan jalan hidup mereka maka mereka harus berusaha untuk mencapai tujuan usaha yang berhasil dengan beragam cara dan cara-cara ataupun akses yang lebih mudah yang akan mereka pilih salah satunya akses yang mudah dalam mendapatkan modal pinjaman melalui tengkulak. Disisi lain pedagang juga sering melakukan tindakan-tindakan yang non-rasional. Adapun tindakan non-rasional yang dilakukan petani adalah dalam melakukan pinjaman modal kepada tengkulak, petani tidak terlalu memperhitungkan kerugian yang mereka alami diantaranya bunga yang lebih tinggi dan keharusan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak meskipun dengan harga yang jauh dibawah harga standar di pasaran, bahkan tidak jarang hanya karena alasan kebiasaan yang sudah menjadi budaya

turun temurun. Sedangkan tindakan rasional yang dilakukan tengkulak adalah memperoleh keuntungan semata. Meskipun pemerintah telah menyediakan alternatif pinjaman/kredit yang disalurkan melalui pihak bank ataupun yang disalurkan melalui program kredit usaha tani melalui koperasi yang ada di desa tersebut, namun kenyataannya petani lebih memilih meminjam modal kepada pemilik modal/tengkulak. Alasan para petani adalah proses dan syarat/prosedur yang diberlakukan pemerintah akan kredit tersebut sangat menyulitkan petani.

F. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Surbakti,1992).

1. Konsep Kuasa Michel Foucault

Pembicaraan mengenai kekuasaan merupakan satu hal menarik yang tidak pernah selesai dibahas. Di masa modern dan kontemporer, diskusi tentang kekuasaan tetap saja relevan. Secara internasional, pengelolaan kekuasaan merupakan isu yang selalu terbaharui. Diskusi tentang kekuasaan

tetap penting terutama ketika umat manusia berkepentingan untuk terus menemukan cara bagaimana menyeimbangkan kekuasaan. Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan-Pengetahuan (Eriyanto, 2003:65).

Pengertian tentang Kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif. Yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Semisal kekuasaan Negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya, suami pada isteri, pemilik modal kepada para karyawannya. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial.(Haryatmoko, 2002:10).

Foucault memperlihatkan cara membaca yang berbeda tentang kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal. Menurut Foucault kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti Kekuasaan lebih pada individu, subjek dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial.

Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagipula sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Karya-karya Foucault menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan telah menjadi pokok perhatiannya sepanjang karier intelektualnya. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.

Salah satu hal yang ditunjukkan oleh Foucault sebagai medan kerja kekuasaan dalam kaitannya dengan strategi adalah tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terkandung kuasa yang melegitimasi dirinya sendiri untuk menjadi penguasa dan memiliki kekuasaan tidak untuk saling mendominasi. Kekuasaan bukanlah milik melainkan strategi. Kekuasaan itu ada di mana-mana dan tidak dapat dilokalisir untuk menjadi milik kelas tertentu hanya karena dilegitimasi oleh kelas yang lebih tinggi atau pun oleh negara. Kekuasaan pun tidak boleh mengambil jalur kekerasan dan penindasan, sebab setiap orang memiliki kuasa sehingga yang dibutuhkan itu bukanlah kekerasan dan penindasan melainkan strategi yang dibutuhkan.

Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia.

Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.

Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol .I*, (1990:94-95). Michel Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Pemikiran Foucault memberi sumbangan besar dalam alam pemikiran filsafat khususnya dalam meneliti gagasan tentang kekuasaan. Kekuasaan pertamanya bukan merujuk pada kepemilikan tetapi lebih dilihat sebagai mekanisme dan strategi kekuasaan. Itu berarti Foucault melihat kekuasaan bukan semata konsep tetapi kekuasaan itu ada di mana-mana dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan ibarat dua sisi dari satu mata uang. Kekuasaan dapat diartikulasikan melalui pengetahuan, namun pengetahuan selalu memiliki efek terhadap kekuasaan. Karena itulah, untuk memahami kekuasaan, diperlukan analisis wacana tertentu, karena pada gilirannya suatu wacana mampu menghasilkan kebenaran. Kebenaran tidak jatuh dari langit atau seketika keluar dari perut bumi, tetapi hadir karena diproduksi. Setiap kekuasaan memiliki tendensi memproduksi kebenaran melalui penyebaran wacana.

Foucault benar-benar meyakini bahwa siapapun yang berkuasa memiliki kemampuan untuk menciptakan wacana dominan melalui praktik-praktek diskursif serta wujud-wujud kekuasaan sebagai sebuah kebenaran. *The Theory of Truth* merupakan pemikiran cemerlang Foucault untuk menggambarkan eksplorasi praktik diskursif penguasa dalam membentuk kebenaran. Gagasan Foucault tentang wacana dan kekuasaan merupakan jawaban bagi pertanyaan mengapa dan bagaimana formasi diskursif tersebut dapat berubah. Foucault memberi contoh bagaimana dokter dengan kekuasaan yang dimilikinya mampu mengukuhkan pasien yang menderita kegilaan harus dirawat pada sebuah klinik sebagai refleksi praktik diskursus yang nyata dari pihak yang berkuasa tersebut. Dengan demikian, suatu 'kebenaran' pada dasarnya dapat dibentuk dan dikondisikan oleh siapapun sebagai *man of desire*. Dalam konteks inilah sesungguhnya media dapat diletakkan sebagai *man of desire* yang memiliki kekuasaan memproduksi kebenaran melalui wacana yang disajikannya. Atau, media juga dapat diletakkan sebagai medan pertarungan bagi perebutan wacana dari pihak-pihak yang sedang berperang memproduksi

kebenaran. Menurut Foucault dalam bukunya *Power/Knowledge* yang, nilai-nilai tertinggi atau kebenaran berasal dari episteme, yaitu keseluruhan pola berpikir dengan sistem wacana yang digunakan. Jadi, kebenaran terjalin secara intrinsik dalam relasi antara wacana yang digunakan manusia untuk mengungkapkan kebenaran itu, sistem kekuasaan yang berlaku, dan kedudukan subjek-subjek yang terlibat.

Setelah melalui dialog episteme, selanjutnya multi-episteme tersebut akan menyusun *panopticism*, yaitu ‘menara pengawas’ yang seolah-olah secara kontinu memonitor segala gerakan orang. Istilah *panopticism* diberikan Foucault untuk mendisiplinkan tubuh para narapidana yang dipenjara. Foucault mengartikan sebagai formula umum dominasi. Tatanan sosial disipliner (*disciplinary social order*) dan strukturasi masyarakat yang didasarkan pada pendisiplinan merupakan *out line* penting dalam sejarah pemikiran Foucault.

Kuasa ada di mana-mana. Ini merupakan terma lanjut dari pandangan Foucault sebelumnya. Dalam pandangan ini, kuasa tidak dapat diidentifikasi milik perseorangan atau institusi. Bagi Foucault, di mana saja selalu ada struktur dan aturan serta relasi yang khas antar manusia. Kondisi tersebut terhubung dengan dunia luar dan di situlah kuasa membuka prakteknya. Tentu saja setiap struktur masyarakat mengenal dan mengakui secara kokoh suatu yang dipandang benar. Pada konteks tersebutlah kuasa bekerja menentukan yang benar dan tidak benar untuk selanjutnya disebarluaskan

2. Teori Hegemoni Gramsci

Konsep hegemoni dikemukakan oleh Gramsci. Gramsci menggunakan atau memakai konsep hegemoni untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasikan pada masa lalu dan masa kini. Terdapat semacam kebingungan disini tentang konsep-konsep yang dilibatkan, karena Gramsci tampaknya terlebih dahulu membedakan konsep negara dengan masyarakat sipil. Negara didefinisikan sebagai sumber kekuasaan koersif dalam suatu masyarakat, sementara masyarakat sipil didefinisikan sebagai lokasi kepemimpinan hegemoni. Gramsci kemudian menghubungkan kedua konsep ini untuk mendefinisikan apa yang dia sebut sebagai 'negara integral' sebagai kombinasi hegemoni yang dilengkapi dengan kekuasaan koersif.

Konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci untuk sebagian masyarakat dari kelas-kelas yang tidak mengeksploitasi hendaknya memberikan persetujuan pada filsafat praksis (*philosophy of praxis*), sebuah istilah Gramsci untuk Marxisme. Hal ini sebagai bentuk pemahaman dan tidak melalui berbagai proses manipulasi atau pun pembebanan oleh elite partai. Orisinalitas konsep Gramsci tentang hegemoni terutama berasal dari keterpisahannya dari pendekatan marxisme yang dogmatis, suatu pendekatan yang melihat Marxisme hanya sebagai suatu teori tentang kelas-kelas yang ditentukan secara ekonomi dan tindakan-tindakan mereka.

Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan

yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. *Kedua*, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, bahkan juga keluarga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan di sisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan.

Pembedaan yang dibuat Gramsci antara “masyarakat sipil” dan “masyarakat politik”, sesungguhnya tidak jelas terlihat, pembedaan itu dibuat hanya untuk kepentingan analisis semata. Kedua suprastruktur itu, pada kenyataannya, sangat diperlukan, satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia tunjuk sebagai “negara integral”. Gramsci juga mengkarakterisasikan apa yang dimaksud dengan negara integral sebagai sebuah kombinasi kompleks antara “kediktatoran dan hegemoni” atau seluruh kompleks aktivitas praktis dan teoritis dimana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominannya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka

yang dikuasai”. Jadi negara adalah aparatus koersif pemerintah sekaligus aparatus hegemonik institusi swasta. Definisi ini memungkinkan Gramsci untuk menghidarkan diri dari pandangan instrumentalis tentang negara memandang negara sebagai sistem politik pemerintah belaka dalam teori politik liberal atau teori lainnya seperti institusi koersif kelas berkuasa dalam teori politik Marxis klasik. Kelebihan konsepsi Gramsci tentang negara integral adalah karena konsepsi itu memungkinkan dirinya memandang hegemoni dalam batasan dialektik yang meliputi masyarakat sipil atau masyarakat politik (Sugiono, 1999)

Lebih jauh dikatakan Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan “dominasi”. Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejala perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi, bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya dengan perangkat kerja yang kedua, yang hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan “*hegemoni*”. Dengan demikian kelompok penguasa atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang inilah yang merupakan hegemoni (Hendarto, 1993:74). Dengan demikian kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” (*konsensus*), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas taanan sosial politik yang ada.

Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999:31)

Menurut Gramsci dalam hegemoni adalah hal yang mengikat masyarakat tanpa menggunakan kekerasan. Lebih lanjut Gramsci menyatakan negosiasi maupun kesepakatan adalah istilah esensial untuk memahami hegemoni. Gagasan, nilai, dan kepercayaan tidak dipaksakan dari atas, tidak juga berkembang dalam cara yang dan tak sengaja, tetapi dinegosiasikan melalui serangkaian perjumpaan dan bentrokan antara kelas-kelas. Hegemoni terjadi dalam satu kurun waktu tertentu yang terjadi melalui serangkaian pertemuan dan proses, dalam hal ini seseorang atau kelompok orang terlibat di dalam melakukan interaksi melalui penyampaian ide, gagasan atau pandangan umum, karena itu, dalam pandangan Gramsci, konsekuensi dari kelas yang ter subordinasi dalam berjuang hanya dapat menjadi kelas yang hegemonik dengan membangun kapasitas dirinya untuk mengambil dukungan dari kekuatan sosial atau kelas lainnya. Kaum proletar dapat mengambil kepemimpinan atas kekuatan-kekuatan lainnya dalam melawan kapitalisme dengan mengubah arah politik kekuatan-kekuatan yang pasti. Ada tiga

tingkatan yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (*integral*), yang merosot (*decadent*) dan yang minimum. Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahwa konsep hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik. Dalam terminologinya “momen” filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang, dominasi merupakan lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh “roh” ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjuk pada moral.

Konsep hegemoni di atas sangat jelas menunjukkan bahwa ada paling sedikit dua pihak yang terlibat dalam suatu masalah, sebagai pihak yang menghegemoni dan pihak yang terhegemoni tanpa memberi batasan dalam konteks apa hegemoni tersebut berlangsung, sehingga hegemoni dapat terjadi dalam bidang apapun. Berkaitan dengan penelitian pihak yang terhegemoni adalah para pedagang dan pihak yang menghegemoni adalah rentenir. Kekuasaan yang tergolong hegemoni tersebut tanpa disadari dan dirasakan oleh para pedagang.

Demikian halnya yang terjadi pada kondisi para pedagang di Pasar Way Halim, secara turun-temurun pedagang adalah pihak yang terhegemoni oleh para rentenir. Rentenir kebanyakan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang diteruskan secara turun-temurun. Sehingga hubungan timbal-balik sudah berlangsung lama ini, semakin mengukuhkan hegemoni rentenir terhadap para pedagang di Pasar Way Halim. Keberadaan/eksistensi para rentenir didorong oleh kondisi sosial ekonomi para pedagang yang dari waktu ke

waktu selalu membutuhkan modal, untuk berbagai keperluan, dengan akses dan prosedur yang mudah. Salah satu alternatif sumber dana cepat dan mudah adalah para rentenir, dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan/diberikan oleh para rentenir, lama-kelamaan para pedagang merasa berhutang-budi kepada para rentenir

Perlahan tetapi pasti, segala ide-ide dan nilai-nilai yang berkembang, khususnya yang datang dari kelompok rentenir, menjadi nilai-nilai yang alamiah dan diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada rasa dirugikan atau merugikan. Bilamana interaksi sosial yang menjurus kepada transaksi-transaksi ekonomi, secara sadar kedua belah pihak, pedagang dan rentenir menyakini bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dibuat adalah bermanfaat secara seimbang bagi kedua belah pihak. Para pedagang biasanya tidak dapat bernegosiasi lebih dari apa yang telah ditetapkan/diputuskan oleh rentenir. Pada kondisi inilah para rentenir telah menghegemoni para pedagang.

Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat

dijelaskan sebagai berikut: Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa. Jadi hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Teori politik Gramsci penjelasan bagaimana ide-ide atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono, 1999).

Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan rentenir untuk merekayasa kesadaran para pedagang, yang pasti bahwa sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral

dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada. Teori hegemoni dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa rumusan masalah baik bentuk, faktor maupun dampak dan makna hegemoni yang terjadi terhadap para pedagang yang terdapat di Pasar Tempel Way Halim.